

Hutan yang Aman Harus Bermanfaat

Ditulis oleh Arief Pujiyanto
Minggu, 4 Januari 2009 14:52

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm
5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

Antara, Jakarta

Departemen Kehutanan (Dephut) tahun ini berhasil menekan jumlah penjarahan dan penebangan liar di kawasan hutan negara.

Namun sektor itu kini menghadapi ancaman baru dari krisis keuangan dunia di tengah kemiskinan yang masih menjerat masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan.

Keberhasilan pengamanan hutan, menurut Menteri Kehutanan MS Kaban terlihat dari penurunan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal yang signifikan.

"Jika tahun lalu masih ada 9.000 kasus pencurian dan pembalakan haram, maka tahun ini jumlahnya turun menjadi 300 kasus," ujarnya.

Tentunya operasi pemberantasan pencurian kayu (illegal logging), kata menteri, perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan koordinasi dengan instansi lain, seperti Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, Perhubungan, Bea Cukai, dan Pemerintah Daerah.

Sementara untuk tetap menjaga ritme pengawasan terhadap kawasan hutan nasional, Dephut kini juga fokus pada upaya mencegah terjadinya pencurian dan pembalakan haram di kawasan konservasi dan hutan lindung yang diketahui masih memiliki potensi tinggi.

Namun yang pasti, persoalan keamanan ini masih akan tetap menjadi salah satu program pokok tahunan Departemen Kehutanan karena sampai kini cukong ataupun penyandang dana dari kegiatan haram itu masih banyak yang bebas berkeliaran, terutama mereka yang berasal dari negara tetangga.

Mereka hanya perlu menunggu kelengahan aparat kehutanan untuk kembali menjalankan operasinya menebangi kayu tanpa izin dari pemerintah.

Sepanjang 2008, beberapa kasus pencurian kayu yang berhasil ditangani Dephut, antara lain penemuan barang bukti 203 batang kayu olahan di kawasan CA Pinus Jantho, Kabupaten Aceh Besar, penyelundupan 120 batang kayu di Jatim, penangkapan 19 kapal motor yang mengangkut 3.267 meter kubik kayu atau tanpa dokumen di Kabupaten Ketapang, Kalbar.

Sementara itu, pelaku perambahan hutan register 40 Padang Lawas, Sumut, yaitu DL Sitorus, telah dipidana delapan tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Areal perkebunan seluas 47.000 hektar di kawasan itu juga disita untuk negara, sedang 24 perambah lainnya sedang ditangani proses hukumnya.

Yang pasti, keberhasilan menekan angka pencurian dan pembalakan haram itu membuat Indonesia mampu menurunkan secara tajam laju deforestasi hutan.

Selama periode 2002-2006, laju deforestasi hutan berhasil ditekan menjadi 1,08 juta hektar per tahun dari sebelumnya di kisaran 2,8 juta hektar per tahun.

Meski demikian, menurut Dirjen Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial, Sunaryo, kegiatan rehabilitasi dan penanaman harus terus digencarkan pemerintah dengan melibatkan semua pihak dan terutama masyarakat karena luas lahan kritis saat ini mencapai 30,4 juta hektar dan degradasi hutan mencapai 59 juta hektar.

Hutan yang Aman Harus Bermanfaat

Ditulis oleh Arief Pujiyanto

Minggu, 4 Januari 2009 14:52

Selain itu, katanya, reklamasi bekas areal tambang juga digalakkan seiring dengan keluarnya PP No.2/2008 yang ditetapkan pada 4 Februari 2008.

PP itu mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan, di luar kegiatan pembangunan kehutanan yang berlaku pada departemen kehutanan.

Sampai kini, kawasan hutan negara yang telah dipinjam pakai untuk sektor lain mencapai 0,68 juta hektar.

Untuk mempercepat upaya rehabilitasi kawasan yang kritis, Dephut terus mempopulerkan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang sudah dimulai sejak 2003.

Sampai 2007, kegiatan yang berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau menanam kawasan kritis ini sudah mencapai 1,597 juta hektar di 282 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas.

Pada periode 2008-2009, Gerhan diharapkan mampu menghijaukan kawasan kritis seluas 5.000.000 hektar. Untuk menunjang target tersebut, sistem penganggaran Gerhan telah menggunakan "multiyears" (sistem kontrak tahun jamak). Anggaran Gerhan sampai 2008 sudah terserap sekitar Rp8,7 triliun.

Selain Gerhan, upaya memperbaiki kondisi lingkungan juga ditawarkan Dephut melalui penanaman serentak 100 juta pohon yang pencanangannya dilakukan Presiden di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tahun lalu, kegiatan serupa mampu menanam 86,9 juta batang bibit.

Untuk tahun ini, kegiatan yang dicanangkan 28 November lalu itu telah mampu direalisasikan sebanyak 79,1 juta batang bibit. Jumlah itu masih akan bertambah karena belum semua daerah melaporkan realisasi penanaman.

Keberhasilan lain yang dicapai Dephut selama kurun waktu tahun 2008 adalah penurunan angka titik api ("hot spot"). Jika tahun lalu, jumlah titik api masih mencapai 27.247 titik, maka selama Januari-November 2008 hanya terpantau 17.020 titik api.

Dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 121.622 titik api, maka jumlah titik api tahun ini turun sebesar 86 persen.

Dongkrak ekonomi

Namun dengan semakin amannya kawasan hutan negara dari ancaman pencurian kayu dan kebakaran, tidak berarti tugas Dephut menjadi semakin ringan dalam mengelola dan membangun sektor tersebut.

Krisis ekonomi pada pertengahan 1997 telah menyusutkan jumlah perusahaan swasta pemegang izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHK-HA) dari 512 unit manajemen dengan luas areal konsesi 50 juta hektar menjadi 270 IUPHHK-HA dengan luas areal konsesi 27,8 juta hektar.

Untuk menjaga kelestarian hutan alam, tahun ini pemerintah juga membatasi pasokan kayu dari kawasan ini sebesar 9,1 juta meter kubik.

Menurut Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) Departemen Kehutanan, Hadi S Pasaribu, volume pasokan kayu dari hutan alam untuk tahun depan kemungkinan juga masih sama,

Meski sampai 2007 ada 36 pemegang ijin baru, namun krisis keuangan dunia yang bermula dari Amerika Serikat di tahun ini dikhawatirkan akan menyurutkan minat investor swasta mengembangkan hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) sebagai pengganti IUPHHK-HA untuk memasok kayu ke industri.

Kekhawatiran ini semakin menguat karena sampai Desember 2008, Dephut sudah meluluskan 11 ijin usaha industri dengan nilai investasi Rp861,1 miliar. Pada periode yang sama tiga ijin

Hutan yang Aman Harus Bermanfaat

Ditulis oleh Arief Pujiyanto

Minggu, 4 Januari 2009 14:52

juga dikeluarkan untuk perluasan kapasitas produksi.

Kenaikan jumlah industri dan kapasitas produksi yang membutuhkan bahan baku makin besar dikhawatirkan akan membuat kasus pencurian kayu meningkat pada tahun-tahun mendatang, jika tidak dibarengi dengan upaya keras mengembangkan HTI untuk memenuhi permintaan bahan baku yang meningkat.

Selain dari sisi permintaan bahan baku legal, ancaman terhadap kelestarian hutan juga muncul dari kemungkinan melonjaknya pengangguran dari sektor kehutanan akibat tutupnya pabrik pengolahan kayu dan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI yang tidak kuat bertahan di tengah badai krisis.

Pengangguran dari sektor ini dapat saja masuk ke kawasan dan melakukan pencurian dan perambahan untuk memperoleh biaya hidup.

Di sisi lain, investasi yang padat modal dalam pembangunan IUPHHK-HTI juga sulit berkembang karena sulitnya permodalan. Saat ini, kata Dirjen BPK, realisasi tanaman IUPHHK-HTI baru mencapai 4,3 juta hektar dari target departemen seluas 5 juta hektar sampai 2009.

Menurut dia, total investasi yang sudah ditanamkan untuk merealisasi tanaman seluas 4,3 juta hektar itu mencapai Rp12,047 triliun.

Sementara itu, jumlah pemegang IUPHHK-HTI sendiri sampai November 2008 mencapai 222 unit manajemen, terdiri dari 164 pemegang SK definitif IUPHHK-HTI, 26 unit manajemen IUPHHK-HTI yang berstatus pencadangan, dan 34 unit manajemen sisanya merupakan IUPHHK-HTI Trans yang luasannya kecil-kecil.

Sementara itu, pemegang status IUPHHK-HTI pencadangan yang dicabut haknya sampai November 2008 mencapai 42 unit manajemen.

"Untuk mencukupi bahan baku industri dalam negeri dan menggantikan pasokan kayu dari IUPHHK-HA, paling tidak dibutuhkan IUPHHK-HTI seluas 12 juta hektar dengan produksi kayu per tahun lebih dari 257 juta meter kubik," katanya.

Masalahnya, menurut kalangan pengusaha sektor kehutanan, krisis keuangan saat ini telah semakin membebani mereka karena pasar tidak lagi membeli.

Saat ini, menurut Ketua Umum Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK), Soewarni, eksporter masih bisa mengeksport produknya berdasarkan kontrak pemesanan yang sudah ditandatangani.

Namun untuk tahun depan, tegasnya, peluang ekspor masih tanda tanya besar.

Karena semakin melemahnya daya beli pasar tujuan ekspor, kata pengurus Asosiasi Panel Kayu Indonesia Abbas Adhar, "Kita juga harus mampu menggarap pasar domestik dan bersaing dengan produk murah dari China."

Dia mengingatkan bahwa kinerja industri kayu lapis Indonesia semakin merosot dan posisi Indonesia di pasar Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, juga sudah disalip China.

Industri kayu lapis yang masih aktif selama Januari-Juni 2008 juga tinggal 61 unit dengan hanya 18 unit di antaranya yang mampu memproduksi secara normal, kata Abbas.

Dengan kondisi yang makin sulit saat ini, ekspor kayu lapis tahun ini diperkirakan turun dibandingkan tahun 2007. Jika tahun lalu, volume ekspor mencapai 3,1 juta meter kubik, maka selama semester pertama tahun ini baru mencapai 1,5 juta meter kubik.

Untuk mengantisipasi kesulitan industri dalam negeri, Menhut mengatakan, kemungkinan melakukan proteksi ada, meski bentuknya harus difikirkan masak-masak agar tidak bertentangan dengan aturan perdagangan dunia.

Namun yang terpenting, menurut dia, industri dalam negeri harus efisien untuk mampu

Hutan yang Aman Harus Bermanfaat

Ditulis oleh Arief Pujiyanto

Minggu, 4 Januari 2009 14:52

bertarung di pasar lokal dan pasar ekspor non internasional.

Sumber kayu baru

Selain IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, Dephut juga merintis untuk mengembangkan pasokan bahan baku dari hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 200.000 hektar dengan nilai investasi Rp1,084 triliun yang bersumber dari badan layanan umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Untuk HTR, Dephut mengalokasikan areal di hutan produksi yang tidak dibebani hak seluas 5,4 juta hektar.

Pengembangan HTR ini untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memiliki akses terhadap hutan guna meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat juga harus digencarkan melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan mengajak masyarakat mengembangkan rotan, bambu, lebah madu, gaharu, dan ulat sutera.

Untuk kawasan hutan adat atau hak ulayat yang kelestariannya masih terjaga, Dephut diharapkan mampu menjawab keinginan masyarakat untuk memperoleh pendapatan dari perdagangan karbon, tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat.

Menurut Dirjen RLPS, Sunaryo, potensi hutan Indoensia sangat besar untuk perdagangan karbon karena saat ini ada 120 juta hektar hutan yang potensi karbonnya mencapai 100 ton per hektar.

Pangeran Charles sebagai salah seorang pemerhati lingkungan telah mengakui potensi hutan tersebut, saat dia berkunjung di Hutan Harapan di Sumatera.

Kunjungan itu merupakan pintu bagi Indonesia untuk menawarkan potensi non kayu dari hutan tropis untuk perdagangan karbon, pariwisata, dan pembangunan kawasan konservasi.

Karena itu, hutan yang bermanfaat dan berdaya guna harusnya menjadi patokan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar aman dari penjarahan dan pencurian serta lestari saja.